



Permasalahan Pangan dan Peringatan Hari Pangan Sedunia Tahun 2012

Sita Hidriyah^{*)}

Abstrak

Hari Pangan Sedunia (HPS) diperingati setiap tanggal 16 Oktober. Peringatan HPS dimaksudkan sebagai media untuk meningkatkan pemahaman, kepedulian dan menggalang kerjasama antar pihak-pihak terkait dalam meningkatkan sinergi menangani masalah pangan yang sedang aktual. Selain itu, juga dimaksudkan untuk mengingatkan kembali bahwa perwujudan Ketahanan Pangan adalah tanggung jawab bersama yang harus dilaksanakan bagi keberlanjutan peradaban manusia. Masalah kemandirian pangan yang diangkat pada HPS ke-32 merupakan masalah bersama penduduk dunia. Untuk memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan diperlukan adanya sinergi kemitraan antar pemangku kepentingan bersamaan dengan terbentuknya kebijakan dan program aksi yang dapat dilakukan.

A. Pendahuluan

Hari Pangan Sedunia (HPS) mengingatkan kondisi ketahanan pangan dunia yang belum mencukupi dan terjangkau oleh semua masyarakat. Banyak warga dunia mengalami kelaparan, kekurangan gizi, dan meninggal dunia. Hingga tahun 2012, kelaparan dan krisis pangan tetap gagal diatasi dengan jumlah orang kelaparan yang masih tinggi yaitu 870 juta jiwa. Penyebabnya sangat beragam, mulai dari bencana, kondisi alam, kemiskinan hingga peperangan.

Menurut *International Food and Policy Research Institute*, Asia Selatan adalah kawasan paling lapar di dunia. Menurut *Global Hunger Index 2012*, yang diproduksi bersama oleh *Welthungerhilfe* (sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat di

Jerman) dan *Concern Worldwide* (sebuah badan amal internasional untuk melawan kemiskinan), 20 negara mempunyai tingkat kelaparan yang sangat mengkhawatirkan dan Asia Selatan mempunyai angka regional tertinggi. Kawasan Sahara di Afrika menempati peringkat di bawahnya. Namun, angka Asia Selatan lebih rendah dari yang tercatat dalam indeks 1990 yang mengindikasikan perbaikan kondisi kelaparan di kawasan tersebut.

B. Dinamika Permasalahan Pangan Dunia

Sejak diperingati mulai tahun 1981, FAO mengadopsi tema HPS yang disesuaikan dengan kepentingan dan masalah pangan dunia yang memerlukan perhatian. Tema HPS di tahun 2012 adalah

^{*)} Peneliti Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: sita.hidriyah@dpr.go.id

Agricultural Cooperatives-Key to Feeding The World. Tahun ini ancaman krisis pangan terjadi akibat kegagalan panen terkait perubahan iklim dan peningkatan jumlah penduduk dunia yang semakin tinggi. Tema tersebut dipilih untuk menunjukkan peran kerjasama dalam memperbaiki ketahanan pangan dan kontribusinya dalam usaha menghapuskan kelaparan dari muka bumi. Kemitraan, berkontribusi terhadap ketahanan pangan dengan membantu petani kecil dan produsen untuk mengakses informasi, alat, dan layanan yang mereka butuhkan. Hal ini memungkinkan para petani meningkatkan produksi pangan, memasarkan produk dan menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan penghidupan mereka sendiri, serta meningkatkan keamanan pangan global.

Pertemuan FAO pada HPS 2012 di Roma, Italia melaporkan, pemerintah negara-negara di dunia dinilai tidak bertindak memadai untuk memberantas kelaparan serta tidak serius mengatasi krisis pangan. Pertemuan tersebut diadakan untuk menemukan cara menurunkan harga pangan di tengah bencana kekeringan yang melanda Australia, Amerika Serikat, serta anjloknya panen di Eropa dan kawasan Laut Hitam. Acara dipimpin oleh Menteri Pertanian Perancis Stephane Le Foll dan dihadiri para menteri dari kelompok G-20. Walau dihadiri oleh perwakilan negara-negara anggota G-20, FAO pesimistis dan tak berharap banyak dari pertemuan ini.

Di tingkat dunia, FAO melaporkan pada tahun 2012 ini terdapat 870 juta jiwa orang kelaparan. Ini merupakan penurunan besar sejak dekade 1990 dengan jumlah warga dunia kelaparan yang melebihi satu miliar jiwa. Namun masih ada peningkatan bila dibandingkan dengan angka kelaparan tahun lalu yang sebesar 825 juta jiwa. Berkaitan dengan tema HPS tahun ini, PBB dengan programnya yaitu *World Food Programme* (WFP) menegaskan kembali komitmennya dan mengajak berbagai kelompok masyarakat, baik masyarakat sipil, pemerintah, maupun sektor swasta untuk mengakhiri kelaparan. *World Food Programme* terus berupaya untuk memastikan, masyarakat miskin kelaparan menerima makanan yang tepat pada waktu yang tepat.

Dari wilayah Sahel di Afrika Barat yang dilanda kekeringan hebat untuk yang ketiga kalinya dalam beberapa tahun terakhir, hingga kerusuhan di Timur Tengah, juga kepada masyarakat yang mengalami kenaikan harga pangan karena mahalnya makanan pokok impor, WFP terus berupaya untuk memberikan bantuan pangan yang dapat menyelamatkan jiwa kepada mereka yang paling membutuhkan. Bahkan pada tahun 2011, WFP telah memberikan bantuan ke hampir 100 juta orang di 75 negara, termasuk lebih dari 11 juta anak-anak yang mendapat dukungan nutrisi khusus dan 23 juta anak-anak yang menerima makanan sekolah atau makanan untuk dibawa pulang ke rumah.

Upaya mempertahankan ketahanan pangan dengan terus meningkatkan panen pertanian dunia tidak mudah. Lahan subur terus menyusut dan adanya perubahan iklim global yang berdampak pada kesuburan tanah turut mengurangi jumlah panen pangan dunia. Perubahan iklim berpengaruh pada ketahanan pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan perubahan iklim maka akan terjadi perubahan kapan turunnya hujan, lamanya musim tanam, banjir, kekeringan., meningkatnya hama dan penyakit tanaman. Sementara secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap perubahan harga karena stok yang berkurang, pengaruh ke distribusi makanan.

PBB dengan program WFP berupaya mengatasi masalah ini melalui bekerja sama dengan koperasi pertanian dan organisasi petani di seluruh dunia. Berbagai program kerjasama tersebut mengupayakan berbagai pelatihan untuk membantu meningkatkan kualitas tanaman, memperkuat praktik bisnis dan meningkatkan akses pasar. Secara khusus, program percontohan WFP *Purchase for Progress* (P4P) telah bekerja sama dengan lebih dari 800 organisasi petani, yang terdiri dari lebih dari satu juta petani kecil, di 20 negara untuk membangun kapasitas dan memaksimalkan dampak pembangunan pengadaan makanan. WFP juga bekerja sama dengan badan-badan PBB lain dalam urusan pangan, yaitu FAO dan *The International Fund for Agricultural*

Development (IFAD). Tiga badan PBB yang berbasis di Roma ini terus bekerja sama dan berinvestasi untuk meningkatkan produksi petani kecil serta meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi.

Namun menurut laporan FAO, pemerintah negara-negara di dunia justru tidak bertindak memberantas kelaparan serta tidak serius mengatasi krisis pangan. Setiap kali dunia dihadapkan pada krisis pangan, sejumlah program diluncurkan namun tidak satupun dijalankan. G-20 yang juga berjanji menstabilkan harga pangan dunia tidak mengalami kemajuan apapun. Momentum yang diharapkan seakan telah hilang. Dunia sepertinya baru akan bereaksi apabila krisis pangan akut sedang terjadi. Hal ini seolah-olah menggambarkan jika krisis pangan tidak terjadi, sulit untuk menggerakkan pemerintahan agar berbuat sesuatu yang nyata. Dunia seakan tidak bekerja sesuai mekanisme, tetapi bertindak hanya di kala panik. Jika keadaan seperti ini terus berlangsung, artinya program permasalahan pangan dunia tidak dijalankan dengan sebuah mekanisme yang tertata.

C. Dinamika Ketahanan Pangan di Indonesia

Pemerintah Indonesia pada dasarnya sudah menyadari bahwa aspek perubahan iklim dan ketahanan pangan akan saling berkaitan dengan jelas. Kenaikan suhu permukaan bumi telah menyebabkan berbagai bencana iklim di Indonesia. Dengan berbagai kejadian tersebut, terbukti model pembangunan yang selama ini dianut perlu diperbaiki, sehingga menjadi lebih kuat, lebih mampu bertahan terhadap gejolak pasar dunia, dan bersahabat dengan lingkungan. Di Indonesia, WFP bertujuan untuk memberikan dukungan yang bersifat katalistis kepada Pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan dan gizi bagi semua rakyat Indonesia. WFP berkolaborasi dengan bersama Pemerintah berupaya membangun fondasi bagi Indonesia untuk menjadi juara dunia dalam perang melawan kelaparan. Komitmen WFP Indonesia mencakup tiga bidang utama yang terkait dengan

keamanan pangan yaitu dalam hal analisis dan pemetaan, manajemen bencana dan mengurangi kekurangan gizi. Strategi pelaksanaan program WFP di Indonesia dilakukan dengan pendekatan dua arah, yakni menanggapi kebutuhan pangan dan gizi secara langsung di antara masyarakat yang paling rentan, sekaligus berinvestasi dalam pengembangan kapasitas yang mendorong kepemilikan lokal dan keberlanjutan.

Indonesia memperingati HPS dengan mengusung tema, "Agroindustri Berbasis Kemitraan Petani Menuju Kemandirian Pangan" dan dipusatkan pelaksanaannya di Temanggung Tilung, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Peringatan HPS 2012 di Indonesia bertepatan dengan disetujuinya Rancangan Undang-undang (RUU) Pangan yang menggantikan UU Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan. Lahirnya RUU Pangan ini menandakan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar dapat mengatur kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan sendiri dan tidak terpengaruh oleh organisasi atau negara lain. Adanya UU ini menunjukkan ketahanan pangan nasional Indonesia yang sudah tidak lagi mengandalkan ketersediaan pangan dari produk-produk impor tetapi lebih mengedepankan kepada produk-produk lokal.

Di Indonesia, jumlah orang miskin masih tinggi. Pada tahun 1990 jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 27,20 juta jiwa atau 15,10%, sedangkan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012 terdapat 29,13 juta atau 11,96% orang miskin yang secara langsung bisa disebutkan sebagai orang yang tidak cukup makan. Selain itu, angka kemiskinan di pedesaan selalu lebih tinggi dari perkotaan. Menurut data BPS, Pada tahun ini saja terdapat 18,48 juta jiwa penduduk miskin pedesaan dan jumlah ini lebih besar dari jumlah penduduk miskin kota yang sebesar 10,65 juta jiwa. Penduduk desa tersebut tentunya adalah petani gurem dan buruh tani yang menurut data sensus pertanian 2003 berjumlah 13 juta jiwa. Jumlah ini akan bertambah pada tahun ini dan bisa disetarakan dengan jumlah penduduk miskin di desa, seiring dengan adanya konversi alih lahan. Angka konversi lahan sendiri sebesar 100 ribu Ha per tahun.

Menurut Ketua Umum Serikat Petani Indonesia yang juga Koordinator Umum La Via Campesina (Gerakan Petani Internasional), Henry Saragih, masih tingginya angka kelaparan dunia ini akibat penerapan konsep ketahanan pangan FAO yang telah menjalankan prinsip-prinsip neoliberalisme yang didorong oleh *International Monetary Fund* (IMF), *World Bank* dan *World Trade Organization* (WTO) yang disponsori oleh negara industri dan kekuatan perusahaan transnasional yang bergerak di bidang pangan dan finansial. Setelah lebih 15 tahun penerapan konsep *food security* (ketahanan pangan) oleh FAO (1996-2012), justru terjadi krisis pangan, krisis keanekaragaman hayati, krisis perubahan iklim dan krisis ekonomi, semua itu menjadi pemicu naiknya angka kemiskinan dan kelaparan. Pada akhirnya kesemuanya ini membuat pangan menjadi sangat jauh dari rakyat yang berada di pedesaan, karena merekalah yang seharusnya pertama kali mendapatkan makanan. Selain itu, pemerintah Indonesia seakan terus melegalkan berbagai bentuk perampasan tanah yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar melalui berbagai program kebijakan dengan dalih mengatasi perubahan iklim, krisis pangan, dan *agrofuel*. Akibatnya banyak petani kecil dan masyarakat adat yang notabene adalah produsen pangan lahannya terampas oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perlawanan kaum tani dan masyarakat adat tak terhindarkan, sehingga konflik agraria semakin meluas. Badan Pertanahan Nasional (2011) mencatat setidaknya terdapat 2.791 kasus pertanahan pada tahun 2011.

D. Penutup

DPR harus terus berupaya untuk mengembalikan arah dan paradigma pembangunan pertanian dan pangan untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional. Kedaulatan pangan Indonesia harus menjadi paradigma baru untuk mengganti paradigma ketahanan pangan yang lama.

DPR perlu mencari solusi terbaik agar penyelesaian konflik agraria yang terjadi sekarang dan mendahulukan kepentingan lahan pangan dalam setiap konflik agraria.

Mekanisme pengawasan DPR harus terus diperkuat. Dengan disahkannya RUU Pangan, diharapkan pemerintah dapat segera mengimplementasikannya. Konsistensi pemerintah dalam menjalankan UU Pangan ini perlu terus dipantau oleh DPR. UU Pangan ini bisa menjadi sebuah landasan operasional pemerintah menuju swasembada pangan, kemandirian pangan, dan akhirnya menuju kepada kedaulatan pangan.

Rujukan:

1. "Harapan Baru Masyarakat Kelaparan Di Hari Pangan Sedunia," <http://www.beritasatu.com/amerika/77849-harapan-baru-masyarakat-kelaparan-di-hari-pangan-sedunia.html>, diakses 17 Oktober 2012.
2. "Hari Pangan 2012, Pangan Makin Jauh Dari Tangan Petani," <http://www.spi.or.id/?p=5666>, diakses 18 Oktober 2012.
3. "Makna Strategis dari Hari Pangan Sedunia 2012," <http://setkab.go.id/artikel-6083-makna-strategis-dari-hari-pangan-sedunia-2012.html>, diakses 19 Oktober 2012.
4. "WFP berkomitmen akhiri kelaparan," <http://www.antarane.ws.com/berita/338885/wfp-berkomitmen-akhiri-kelaparan>, diakses 20 Oktober 2012.
5. "Pemerintah Tak Tepati Janji: FAO Sangat Pesimistis Soal Program Pemberantasan Kelaparan," *Kompas*, 17 Oktober 2012.
6. "WFP Dan Pemerintah Indonesia Nyatakan Perang Melawan Kelaparan," <http://mediaprofesi.com/sosialita/1668-wfp-dan-permerintah-indonesia-nyatakan-perang-melawan-kelaparan.html>, diakses 20 Oktober 2012.
7. "Hari Pangan Dunia: Asia Selatan Kawasan Paling Lapar," <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2012-10-16/hari-pangan-dunia-asia-selatan-kawasan-paling-lapar/1031122>, diakses 20 Oktober 2012.
8. "Wapres Hadiri Peringatan Hari Pangan Di Palangkaraya," <http://infopublik.kominfo.go.id/?page=news&newsid=34141>, diakses 20 Oktober 2012.
9. "Aksi Simpatik Sambut Hari Pangan Sedunia," *Republika*, 17 Oktober 2012.